



**BADAN  
STANDARDISASI  
NASIONAL**



**Laporan Kinerja  
Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan  
Pengadaan  
2023**

---

## KATA PENGANTAR

---



Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "*good governance*" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan (Biro PKUP) Tahun 2023 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) kepada semua pihak yang berkepentingan.

Laporan Kinerja Biro PKUP Tahun 2023 merupakan Laporan Kinerja tahun Keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Dalam proses penyusunannya, Laporan Kinerja ini telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Sekretaris Utama BSN Nomor 22/KEP/SESTAMA/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Biro PKUP Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh Unit Kerja di lingkungan BSN di masa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2023  
Biro Perencanaan, Keuangan, Umum  
dan Pengadaan

Ajat Sudrajat

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan (Biro PKUP) memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pemberian dukungan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara serta pelayanan pengadaan barang/jasa.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Biro PKUP telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan 6 (Enam) sasaran dan 10 (Sepuluh) indikator kinerja. Sasaran dan indikator kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Dukungan Manajemen yang diamanatkan kepada Biro PKUP.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Biro PKUP Tahun 2023 menurut sasaran:

**Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2023**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian *)
1. Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN	1. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja BSN	72,5 Nilai	70,84 Nilai	97,71%
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran	2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BSN	92 Nilai	93.3 Nilai	101,41%
3. Meningkatnya kualitas layanan umum dan pengadaan	3. Nilai Pengawasan Kearsipan BSN	81 Nilai	85.99 Nilai	106%
	4. Indeks pengelolaan aset	3,3 Nilai	3.3 Nilai	100%
	5. Indeks tata kelola pengadaan	61 Nilai	62,85 Nilai	103,3%
	6. Persentase permintaan kebutuhan perkantoran yang ditindaklanjuti	80%	80%	100%
4. Meningkatnya kualitas layanan	7. Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro PKUP di lingkup Settama	3,5 Nilai	3.11 Nilai	88.86%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian *)
internal Biro PKUP di lingkup Settama				
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Settama di lingkup Biro PKUP	8. Persentase pelaksanaan RB Settama di lingkup Biro PKUP	93 %	99%	106.45%
	9. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Settama di lingkup Biro PKUP	72,5 Nilai	80 nilai	110.34%
6. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Biro PKUP	10. Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Biro PKUP	95 Nilai	102.42 Nilai	107.81%
<b>Rata-rata capaian Tahun 2023</b>				<b>102.19%</b>

\*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja di Biro PKUP, sebanyak 8 (Delapan) indikator kinerja telah tercapai atau melebihi target yaitu:

- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BSN
- Nilai Pengawasan Kearsipan BSN
- Indeks pengelolaan aset
- Indeks tata kelola pengadaan
- Persentase permintaan kebutuhan perkantoran yang ditindaklanjuti
- Persentase pelaksanaan RB Settama di lingkup Biro PKUP
- Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Settama di lingkup Biro PKUP, dan
- Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Biro PKUP

Sedangkan 2 (dua) indikator kinerja yang targetnya tidak tercapai 100% yaitu:

- Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja BSN
- Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro PKUP

Untuk indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah 100% telah dilakukan langkah-langkah perbaikan antara lain:

- Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja eselon I dan II di BSN
- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan sarana prasarana layanan Biro PKUP dengan cara melakukan *benchmarking* ke Kementerian/Lembaga yang tingkat pelayanannya lebih baik, namun

bagaimanapun juga untuk capaian kinerja yang telah tercapai targetnya tetap dilakukan upaya perbaikan antara lain: meningkatkan koordinasi dengan melakukan persamaan persepsi antar unit kerja sehingga dapat melakukan perencanaan yang terpadu antar dokumen perencanaan yang disusun oleh unit kerja.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, pada tahun 2023 Biro PKUP mengelola pagu anggaran sebesar **Rp.131.107.627.000** dengan realisasi sebesar **Rp.130.412.098.900** atau sebesar **99.47%**.

---

# DAFTAR ISI

---

<b>Halaman Cover</b> .....	1
<b>Kata Pengantar</b> .....	2
<b>Ringkasan Eksekutif</b> .....	3
<b>Daftar Isi</b> .....	6
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
I.1 Latar Belakang .....	7
I.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	7
I.3 Sumber Daya Manusia .....	8
I.4 Peran Strategis .....	10
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
II.1 Perencanaan Strategis .....	11
II.1.1 Visi dan Misi .....	11
II.1.2 Tujuan dan Sasaran .....	13
II.2 Perjanjian Kinerja .....	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
III.1 Capaian Kinerja .....	17
III.2 Capaian Kegiatan .....	36
III.3 Capaian di Luar Perjanjian Kinerja .....	37
III.4 Realisasi Anggaran .....	37
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
Penutup .....	39

## LAMPIRAN


Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan

---

# BAB I PENDAHULUAN

---

## I.1 LATAR BELAKANG

etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan (Biro PKUP), sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Capaian kinerja Biro PKUP memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Sekretariat Utama dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Biro PKUP merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Biro PKUP Tahun 2023.

## I.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

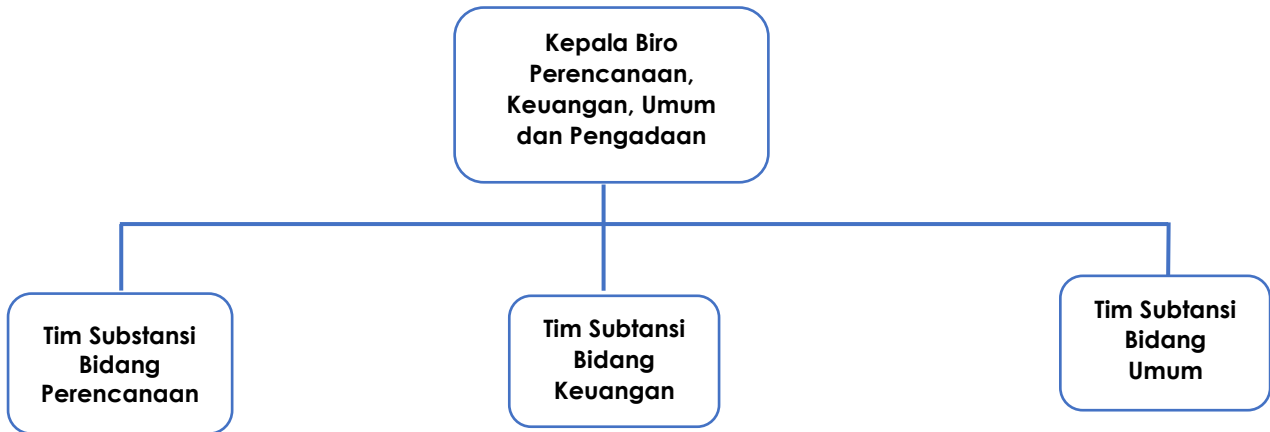
Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021, tugas Biro PKUP adalah melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pemberian dukungan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara serta pelayanan pengadaan barang/jasa.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Biro PKUP menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengekoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja,
- b. Pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pelaporan keuangan, dan penerimaan negara bukan pajak,
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dan keprotokolan, dan

- d. Pelaksanaan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa.

Struktur Biro PKUP dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar I.1**  
**Struktur Organisasi Biro PKUP**

Demi mewujudkan tata kelola organisasi Badan Standardisasi Nasional yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Standardisasi Nasional maka BSN melakukan reorganisasi pada bulan September 2020.

Sebagaimana dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2023.

### I.3 SUMBER DAYA MANUSIA

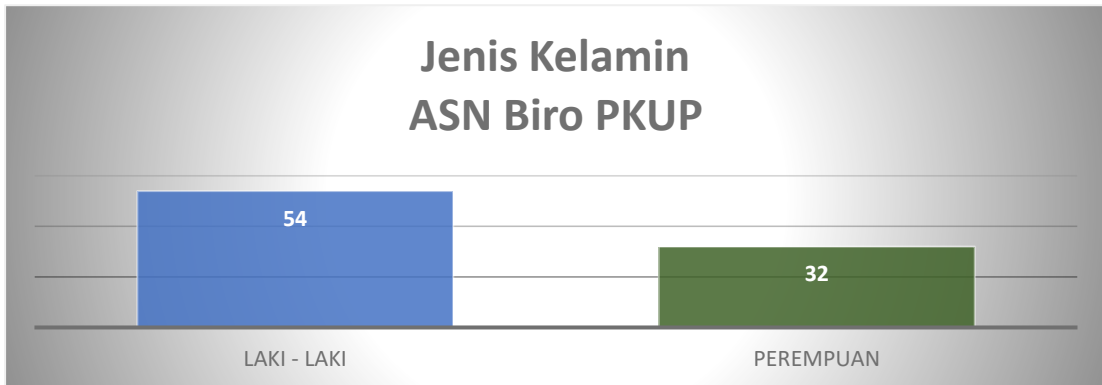
Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2023 Biro PKUP memiliki pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 86 orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

**Tabel I.1**  
**Personel ASN Biro PKUP**

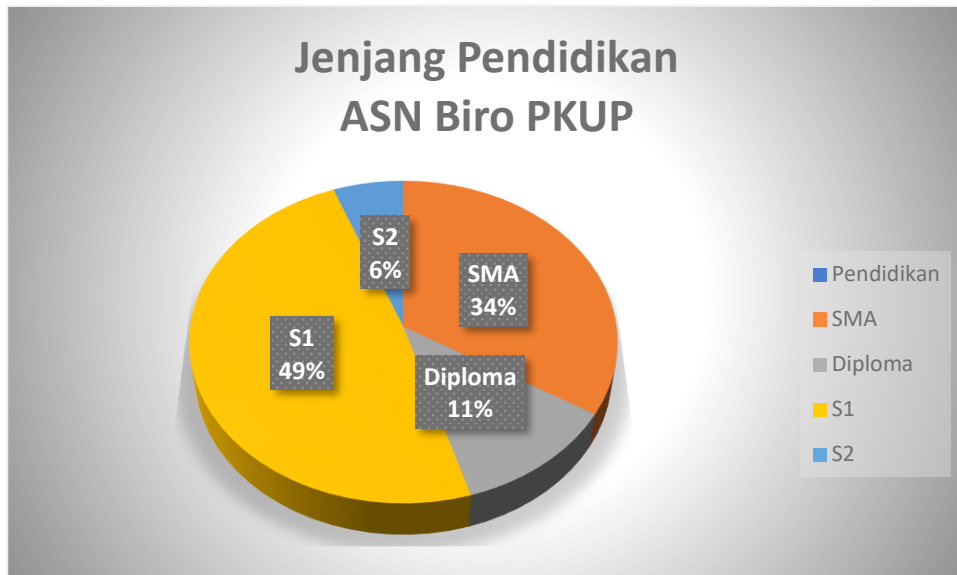
No	Uraian	Jenjang Pendidikan			Jumlah Orang
		< S1	S1	S2	
1.	Kepala Biro PKUP	-	1	-	<b>1</b>
2.	Kelompok Substansi Perencanaan	-	9	4	<b>13</b>
3.	Kelompok Substansi Keuangan	7	7	-	<b>14</b>
4.	Kelompok Substansi Umum	36	22	-	<b>58</b>



	Jumlah	43	39	4	86
--	--------	----	----	---	----



**Gambar I.1**  
**Personel ASN Biro PKUP Menurut Jenis Kelamin**



**Gambar I.2**  
**Personel ASN Biro PKUP Berdasarkan Pendidikan**

#### **I.4 PERAN STRATEGIS**

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional, Biro PKUP mempunyai peran strategis dan sangat fundamental dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh unit-unit kerja substansi di lingkungan BSN.

Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya Biro PKUP telah mengidentifikasi potensi/isu strategis, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang telah dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

**Tabel I.2**  
**Potensi/Isu Strategis dan Permasalahan Biro PKUP**

Potensi/ Isu Strategis	Permasalahan	Tindak Lanjut
1. Aplikasi e-Performance BSN untuk pemantauan kinerja.		
	- Kementerian keuangan yang belum mau membuka integrasi antara aplikasi e-performance dan SMART	- Terus membuka komunikasi dengan Kemenkeu
2. Digitalisasi dokumen pertanggungjawaban		
	- Masih banyak kegiatan yang dalam proses pertanggungjawaban menggunakan print out (belum digital) sehingga tidak ada keseragaman, sehingga proses digitalisasi memerlukan <i>rework</i> di bagian keuangan atau pengelola keuangan di masing-masing unit.	- Seluruh dokumen pertanggungjawaban akan dilakukan digitalisasi sehingga dokumen dapat diakses dengan mudah.
3. Waktu yang dibutuhkan untuk mengakses arsip		
	- Arsip inaktif yang fisik disimpan terecord terdapat di Serpong.	- Sudah dibuat dalam sistem elektronik dapat diperoleh dalam waktu rata-rata 7,75 menit.

---

# BAB II PERENCANAAN KINERJA

---

## II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

### II.1.1 Visi dan Misi

**B**adan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

### VISI

**“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”**

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun (2020-2024) yaitu:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks standarisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi Nasional yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu:

## **MISI**

### **“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”**

Pengelolaan standarisasi dan penilaian kesesuaian ini meliputi tahapan:

- a. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan,
- b. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh,
- c. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global.
- d. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.
- e. Mengelola sumber daya manusia di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
- f. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional.

## II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran yang ingin dicapai dari misi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Tujuan Biro PKUP mengacu pada tujuan pada Renstra Biro PKUP Tahun 2020-2024 yang telah selaras dengan Renstra BSN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

### TUJUAN

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya penguatan akuntabilitas BSN	Predikat akuntabilitas BSN, dengan target sampai dengan 2024 sebesar 73 nilai

Sasaran di sini merupakan sasaran di lingkungan Biro PKUP selaku Unit Pendukung di lingkungan BSN. Biro PKUP dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Biro PKUP harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*.

Sasaran Biro PKUP mengacu pada sasaran yang tertuang dalam Renstra Biro PKUP Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BSN adalah sebagai berikut:

### SASARAN

Sasaeaan Biro PKUP sesuai Renstra Perubahan BSN Tahun 2020 – 2024 dan IKU di lingkungan BSN terkait Biro PKUP

Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1. Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN	1. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja BSN
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran	2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BSN
	3. Nilai Pengawasan Kearsipan BSN

Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Meningkatnya kualitas layanan umum dan pengadaan	4. Indeks pengelolaan aset
	5. Indeks tata kelola pengadaan
	6. Persentase permintaan kebutuhan perkantoran yang ditindaklanjuti
4. Meningkatnya kualitas layanan internal Biro PKUP di lingkup Settama	7. Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro PKUP di lingkup Settama
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Settama di lingkup Biro PKUP	8. Persentase pelaksanaan RB Settama di lingkup Biro PKUP
	9. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Settama di lingkup Biro PKUP
6. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Biro PKUP	10. Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Biro PKUP

## II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Biro PKUP Tahun 2023 yang telah selaras dengan IKU di lingkungan BSN terkait Biro PKUP berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1. Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN	1. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja BSN	72,5 nilai
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran	2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BSN	92 Nilai
3. Meningkatnya kualitas layanan umum dan pengadaan	3. Nilai Pengawasan Kearsipan BSN	81 Nilai
	4. Indeks pengelolaan aset	3,3 Nilai

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	5. Indeks tata kelola pengadaan	61 Nilai
	6. Persentase permintaan kebutuhan perkantoran yang ditindaklanjuti	80 %
4. Meningkatnya kualitas layanan internal Biro PKUP di lingkup Settama	7. Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro PKUP di lingkup Settama	3,5 Nilai
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Settama di lingkup Biro PKUP	8. Persentase pelaksanaan RB Settama di lingkup Biro PKUP	93 %
	9. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Settama di lingkup Biro PKUP	72,5 Nilai
6. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Biro PKUP	10. Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Biro PKUP	95 Nilai

**Tabel II.1**  
**Perjanjian Kinerja Biro PKUP Tahun 2023**

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Biro PKUP pada tahun 2023 menetapkan sebanyak 6 (enam) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Biro PKUP melaksanakan **Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perencanaan, Keuangan dan Umum** dalam **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk RO (Rincian Output) yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Kode	Kegiatan/KRO/RO	Target
084.01.WA	Program Dukungan Manajemen	
3550	Peningkatan Pelayanan Perencanaan, Keuangan dan Umum	
EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan
EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan
EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan
EBD.952	Layanan Perencanaan & Penganggaran	1 Layanan
EBD.953	Layanan Pemantauan dan evaluasi	1 Layanan
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1 Layanan
EBD.974	Layanan Manajemen Kearsipan	1 Layanan
EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan
EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan



---

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

---



lembaga.

akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi

Biro PKUP berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Biro PKUP telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Biro PKUP Tahun 2023.

### III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga yang mendukung visi dan misi presiden, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Biro PKUP yang direncanakan dalam Tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel III.1**  
**Pencapaian Kinerja Biro PKUP Tahun 2023**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian*)</b>
1. Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN	1. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja BSN	72,5 Nilai	70.84 Nilai	97.71
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran	2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BSN	92 Nilai	93.3 Nilai	101.41
3. Meningkatnya kualitas layanan umum dan pengadaan	3. Nilai Pengawasan Kearsipan BSN	81 Nilai	85.99 Nilai	106%
	4. Indeks pengelolaan aset	3,3 Nilai	3.3 Nilai	100%
	5. Indeks tata kelola pengadaan	61 Nilai	62,85 Nilai	103,3%
	6. Persentase permintaan kebutuhan perkantoran yang ditindaklanjuti	80 %	80%	100%
4. Meningkatnya kualitas layanan internal Biro PKUP di lingkup Settama	7. Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro PKUP di lingkup Settama	3,5 Nilai	3.11 Nilai	88.86%
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Settama di lingkup Biro PKUP	8. Persentase pelaksanaan RB Settama di lingkup Biro PKUP	93 %	99%	106.45%
	9. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Settama di lingkup Biro PKUP	72,5 Nilai	80 Nilai	110.34%
6. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Biro PKUP	10. Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Biro PKUP	95 Nilai	102.42 Nilai	107.81%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Biro PKUP untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian kinerja tersebut dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel III.2  
Capaian Kinerja Sasaran 1**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2022	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
1. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja BSN	nilai	70.70	72,5	70.84	97.71%	73	97.04
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>97.71%</b>		<b>97.04%</b>

\*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran terwujudnya penguatan akuntabilitas BSN terdiri dari indikator kinerja **Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja BSN**. Indikator kinerja ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru Biro PKUP di tahun 2023, yang merupakan hasil revidi Biro PKUP untuk menindaklanjuti hasil revidi Kemenpan RB. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 97.71%.

Dari capaian tersebut maka realisasi kinerja untuk indikator 1 (satu) ini belum mencapai target 100% dan adapun penjelasan narasi dari indikator kinerja utama Biro PKUP yang pertama ini adalah sebagai berikut:

### **1. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja BSN**

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 perlu diganti agar dapat mengakomodir kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi sehingga diperlukan penyesuaian dalam evaluasi atas implementasi.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penyesuaian tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana Pasal 2 adalah bertujuan untuk:

1. memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
5. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Dalam melaksanakan evaluasi AKIP sebagaimana Pasal 4 ayat (2), Kementerian dapat dibantu oleh instansi lain yang penunjukannya ditetapkan oleh Menteri, dan dalam melaksanakan evaluasi AKIP tersebut, Kementerian dapat menggunakan sistem evaluasi berbasis elektronik sebagaimana Pasal 4 ayat (3).

Jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja Tahun 2022 maka nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja BSN Tahun mengalami kenaikan 0,14% sehingga BSN memperoleh nilai 70,84 dengan kategori BB

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	23.25	23.47
b. Pengukuran Kinerja	30	20.18	21.06
c. Pelaporan Kinerja	15	11.12	11.14
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16.15	15.17
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>70.70</b>	<b>70.84</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>	<b>BB</b>

**Gambar 3.1**  
**Perbandingan Nilai Evaluasi Pelaksanaan AKIP BSN Tahun 2022 – 2023**

Dari gambar di atas terlihat bahwa dari ke 4 (empat) komponen yang dinilai 3 (tiga) komponen mengalami kenaikan yaitu pada komponen :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja, dan
3. Pelaporan Kinerja

Sementara 1 (satu) komponen mengalami penurunan nilai yaitu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, sehingga dari hasil penilaian tersebut maka direkomendasikan sebagai berikut :

Berdasarkan capaian kinerja atas indikator 1 (satu) ini maka direkomendasikan hal – hal sebagai berikut:

1. Melakukan penyempurnaan pada penyusunan pohon kinerja yang telah dibuat dengan memastikan penentuan *Ultimate outcome* yang ingin dicapai sudah memenuhi *Clarity about objective* yang artinya sudah lebih spesifik dan jelas;
2. Menyusun pohon kinerja pada seluruh unit kerja yang ada di lingkup BSN berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, sehingga penjabaran kinerja dari level tertinggi sampai ke level terendah dapat selaras dan akan mendukung dalam pencapaian dan peningkatan kinerja;
3. Melakukan reviu dan perbaikan kepada sasaran strategis yang menjadi *Mandatory* pada unit kerja agar dapat berorientasi pada hasil atau *outcome oriented*;
4. Melakukan penyempurnaan pada aplikasi e-performance BSN dengan menyajikan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran dalam satu menu. Sehingga dapat terlihat keterkaitan antara realisasi anggaran dengan kinerja yang dicapai;
5. Mendorong komitmen pimpinan dari seluruh unit kerja untuk memanfaatkan aplikasi e-performance BSN sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif dengan melakukan update capaian kinerja secara berkala, sehingga dapat diketahui progress pencapaian target kinerja yang ingin dicapai;
6. Meningkatkan kualitas laporan kinerja khususnya pada level unit kerja dengan menyajikan secara detail analisis mengenai faktor pendukung maupun faktor penghambat tercapainya kinerja. Selain itu, dilengkapi juga dengan upaya/strategi yang akan dilakukan tahun berikutnya untuk meningkatkan kinerja.

Dalam mencapai sasaran 1 ini pelaksanaan kegiatannya melibatkan seluruh unit kerja di BSN melalui kegiatan rapat dan forum diskusi dengan Kementerian Pan & RB sebagai narasumber.

**SASARAN  
2****Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran****Tabel III.3  
Capaian Kinerja Sasaran 2**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
			Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BSN	Nilai	91.49	92	93.3	101,41%	92	101,41
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>101,41%</b>		<b>101,41%</b>

\*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran dengan indikator kinerja Persentase Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BSN dihitung dari hasil penilaian Kementerian keuangan yang tertuang pada aplikasi OM-SPAN

Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut adalah 93,3 dari target yang ditetapkan yaitu 92 ini artinya capaian kinerja untuk indikator ini sebesar **101,41%**.

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.

Dari capaian tersebut maka realisasi kinerja untuk indikator 2 (Dua) ini telah melebihi target yang ditetapkan 100% dan adapun penjelasan narasi dari indikator kinerja utama Biro PKUP yang pertama ini adalah sebagai berikut:

**2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BSN**

Penilaian ini berdasarkan pada PMK Nomor 195 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Monev Pelaksanaan belanja anggaran K/L dan terdapat Tiga belas (13) indikator yang dinilai yaitu:

		INDIKATOR PENILAIAN	
Kesesuaian antara perencanaan dengan	1	Revisi DIPA	
	2	Deviasi Halaman III DIPA	
	3	Pagu Minus	
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran	4	Data kontrak	
	5	Pengelolaan UP dan TUP	
	6	LPJ Bendahara	
	7	Dispensasi SPM	
Efektivitas Pelaksanaan Anggaran	8	Penyerapan anggaran	
	9	Penyelesaian tagihan	
	10	Capaian output	
	11	Retur SP2D	
Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	12	Kesalahan SPM	
	13	Perencanaan Kas	

Dari realisasi kinerja ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BSN pada tahun 2023 telah tercapai melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 101,41 %.

Jika dibandingkan dengan penilaian IKPA BSN tahun sebelumnya maka pada Tahun 2023 ini nilai IKPA BSN mengalami kenaikan sebesar 1,84 ini terlihat dari gambar 3.2 di bawah ini

**Indikator Pelaksanaan Anggaran TA. 2022**

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	133	084	613104	SEKRETARIAT UTAMA BADAN STANDARISASI NASIONAL	Nilai	100,00	59,98	83,71	92,88	97,65	96,93	100,00	100,00	91,48	100%	91,48
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10,00	6,00	16,74	9,29	9,77	9,69	5,00	25,00			
					Nilai Aspek	79,99		94,23				100,00				

**Indikator Pelaksanaan Anggaran TA. 2023**

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	133	084	613104	SEKRETARIAT UTAMA BADAN STANDARISASI NASIONAL	Nilai	100,00	83,15	89,63	94,12	100,00	96,76	100,00	100,00	93,33	100%	93,33
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10,00	6,32	17,93	9,41	10,00	9,68	5,00	25,00			
					Nilai Aspek	81,50		96,10				100,00				

**Gambar 3.2**  
**Perbandingan Nilai IKPA BSN 2022 - 2023**

**Tabel III.4**  
**Penilaian IKPA BSN 2020 – 2023**

Penilaian IKPA BSN			
2020	2021	2022	2023
85.68	95.10	91.49	93.33

Untuk perbandingan dengan tahun sebelumnya maka terlihat bahwa terdapat kenaikan penilaian dari tahun sebelumnya. Dari indikator penilaian tahun 2023 terlihat bahwa terdapat nilai paling kecil yaitu deviasi halaman III DIPA ini artinya terdapat perbedaan kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulannya sehingga kualitas perencanaan anggaran BSN belum maksimal. Sehingga diharapkan di tahun mendatang terdapat kesesuaian antara realisasi anggaran dengan RPD setiap bulannya tidak terjadi deviasi yang cukup besar.

Untuk mencapai target Indikator ini pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh PIC kegiatan unit kerja BSN, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengelola kegiatan di lingkungan BSN dengan melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya serta melaporkannya secara tertib dan akurat untuk meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran TA 2023.

Walaupun telah mencapai target yang ditetapkan terdapat kendala yang dihadapi yaitu kurangnya perhatian pejabat pembuat komitmen dalam mengupdate rencana penarikan dana yang kegiatannya mengalami revisi baik eksternal maupun internal. Sehingga diharapkan di tahun mendatang deviasi halaman III DIPA tidak terlalu jauh,



**Tabel III.5  
Capaian Kinerja Sasaran 3**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		Target	Realiasi	% *)	Target 2024	% capaian
3. Nilai Pengawasan Kearsipan BSN	Nilai	81	85.99	106%	82	104.87%
4. Indeks pengelolaan aset	Nilai	3,3	3.3	100%	3.4	91.18%
5. Indeks tata kelola pengadaan	Nilai	61	62.85	103.3%	61	103.3%
6. Persentase permintaan kebutuhan perkantoran yang ditindaklanjuti	%	80	80	100%	80	100%
<b>Rata-rata capaian</b>				<b>102.3%</b>		<b>99.84%</b>

Indikator kinerja untuk mengukur Meningkatnya kualitas layanan umum dan pengadaan dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

3. Nilai Pengawasan kearsipan
4. Indeks pengelolaan aset
5. Indeks tata kelola pengadaan
6. Prosentase permintaan kebutuhan perkantoran yang ditindaklanjuti

### **3. Nilai pengawasan kearsipan**

Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai penerapan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan di setiap Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan pasal 24 disebutkan bahwa nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan Internal.

Untuk menghitung capaian indikator nilai pengawasan kearsipan adalah :

- a. 60% penilaian pengawasan eksternal oleh ANRI
- b. 40% penilaian pengawasan internal BSN.

Dan untuk Tahun 2023 ini dihasilkan bahwa penilaian pengawasan kearsipan adalah 85,99 dari target 81 atau sebesar 106%. Nilai hasil Pengawasan

Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada obyek pengawasan.

Pada Pengawasan Kearsipan tahun 2023, sesuai dengan Pengumuman Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023 oleh Arsip Nasional RI nomor AK.01.00/23/2023 tanggal 14 Desember 2023 Badan Standardisasi Nasional memperoleh capaian nilai 85,99 dengan kategori Memuaskan dengan rincian penilaian adalah sebagai berikut:

**Tabel III.6**  
**Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan BSN**

Nilai Hasil Pengawasan (NHP)	NHP 2023	Bobot	NHPxBobot
Eksternal	83,95	60%	50,37
Internal	89,05	40%	35,62
<b>Nilai Akumulasi</b>			<b>85.99</b>

Dari realisasi kinerja ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja Nilai monitoring pengawasan kearsipan oleh ANRI pada tahun 2023 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu dari target 81 didapatkan hasil 85,99 atau sebesar 106% .

Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2022 dan 2021 maka terlihat pada matriks di bawah ini

**Tabel III.7**  
**Perbandingan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan BSN**

Nilai Hasil Pengawasan (NHP)	NHP 2021	NHP 2022	NHP 2023
Eksternal	41,13	43.43	50,37
Internal	27,98	32.74	35,62
Nilai Akumulasi	69.11	76.17	85,99

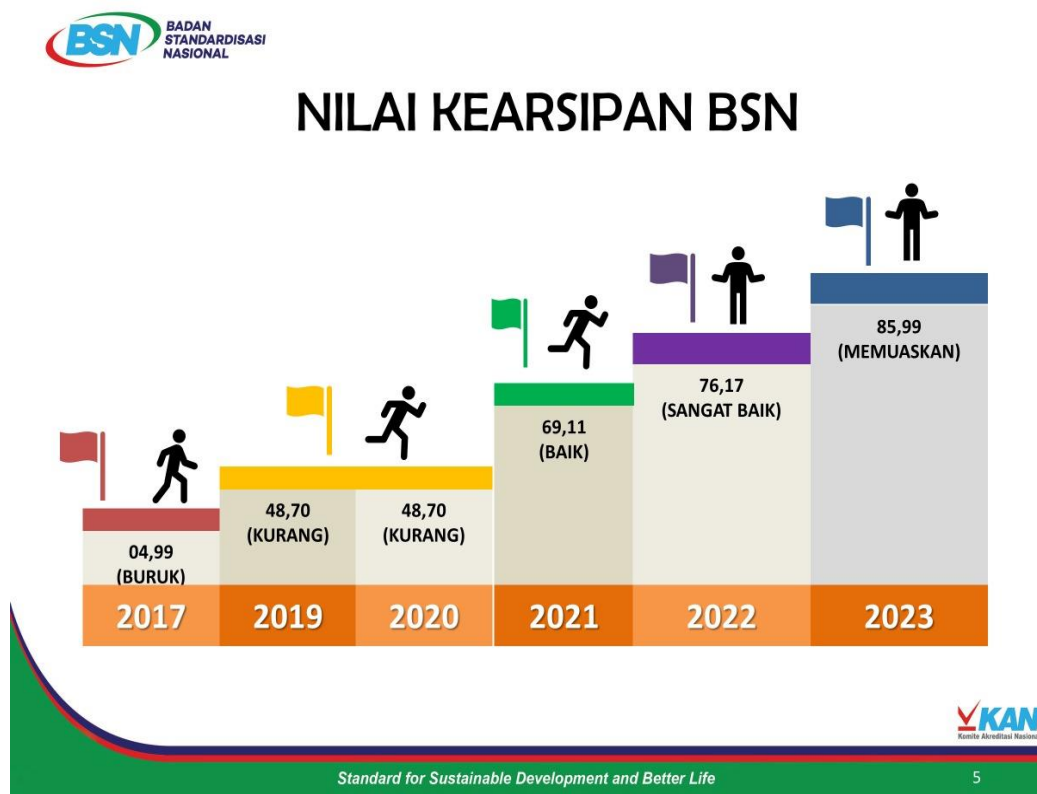
Jika dilihat dari tabel perbandingan di atas maka terjadi kenaikan yang cukup signifikan dimana pengelolaan kearsipan di BSN sudah mulai dibenahi dan diperbaiki namun walaupun demikian ada hal-hal yang perlu diperhatikan BSN antara lain:

1. Pelaksanaan penyusutan arsip sesuai peraturan perundang-undangan
2. Penyerahan arsip statis BSN kepada ANRI
3. Peningkatan kompetensi SDM Kearsipan melalui sertifikasi dan diklat teknis.

Selain Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan, pada tahun 2023 juga dilakukan Audit Pengelolaan Arsip Elektronik. Nilai Audit ini merupakan salah satu indikator dalam Reformasi Birokrasi. Untuk BSN sesuai dengan Keputusan Kepala ANRI Nomor 392 Tahun 2023 tentang Nilai Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip (TDA) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi Tahun 2023 memperoleh nilai 94,65 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan). Nilai ini telah diupload dalam portal Reformasi Birokrasi Kementerian PAN RB.

Perolehan nilai TDA ini dilihat dari 4 aspek penilaian yaitu:

1. Digitasi Arsip
2. Implementasi Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (ABKD) yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)
3. Sumber Daya ABKD
4. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)



**Gambar 3.3**  
Perkembangan nilai kearsipan BSN 2017 - 2023

Perolehan nilai 85,99 di tahun 2023 ini dengan kategori sangat memuaskan merupakan upaya bersama seluruh unit kerja di BSN dalam pengelolaan kearsipan yang dilakukan dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi dari ANRI melalui rapat – rapat pembahasan, diskusi dengan ANRI.

#### **4. Indeks Pengelolaan Aset**

Adalah penilaian kualitas dan kinerja BMN dalam bentuk rata-rata tertimbang (weighted average) melalui pengukuran 3 sasaran strategis dengan 8 parameter dari:

- a. Pengelolaan kekayaan Negara yang akuntabel dan produktif, yang mencakup (i) temuan BPK LKPP terkait BMN pada K/L (materialitas temuan BPK LKPP terkait BMN pada K/L dan temuan BPK LKPP terkait BMN pada K/L) dan (ii) realisasi PNBPN dari pengelolaan aset
- b. Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan, yang mencakup (iii) Ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN (ketepatan waktu penyampaian RKBMN, ketepatan waktu penyampaian LBP, ketepatan waktu penyampaian laporan Wasdal) dan (iv) Asuransi BMN
- c. Pengawasan dan pengendalian yang efektif, yang mencakup (v) Tindak lanjut pengelolaan BMN (tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN, tindak lanjut terhadap BMN rusak berat) dan (vi) persentase penyelesaian temuan BPK terkait BMN

Pada Tahun 2023 ini BSN memperoleh nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) sebesar 3,32 pencapaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 3,3 atau sebesar 100%.

Jika dibandingkan dari capaian tahun 2022 sebesar 3,32 maka capaian 2023 terjadi capaian yang sama hal ini disebabkan karena untuk tahun 2023 penilaian dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara belum dilaksanakan jadi saat ini masih menggunakan penilaian di Tahun 2022 sebesar 3,32 dari skala 4.

#### **5. Indeks Tata Kelola Pengadaan**

Indikator ini diperoleh melalui indikator pemanfaatan sistem pengadaan, kualifikasi & kompetensi SDM PBJ, dan tingkat kematangan UKPBJ. Melalui penilaian indeks tata kelola pengadaan, diharapkan celah dan ruang perbaikan dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai pengadaan barang/jasa sehingga profesional, efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel.

Ini merupakan indikator baru pada tahun 2023 sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sehingga capaian Tahun 2023 ini BSN memperoleh nilai 62,85 dimana pencapaian sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 61 (kategori Cukup).

Namun masih terdapat hal-hal yang harus diupayakan ke depannya untuk dapat mencapai Indeks Tata Kelola Pengadaan Kategori Baik, di antaranya pada variabel Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik diperlukan kebijakan dalam penerapan Pengadaan Langsung Secara Elektronik serta penyusunan data dukung untuk variabel Tingkat kematangan UKPBJ.



**Gambar 3.4**  
**Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan**

## 6. Persentase permintaan kebutuhan perkantoran yang ditindaklanjuti

Indikator persentase Permintaan kebutuhan perkantoran yang ditindaklanjuti merupakan jumlah permintaan kebutuhan sarana dan prasarana (sarpras) kantor dengan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai penunjang utama terselenggaranya pelaksanaan tugas perkantoran dengan ditindaklanjutinya permintaan tersebut.

Indikator ini dihitung dari permintaan kebutuhan perkantoran yang ditindaklanjuti dibanding permintaan kebutuhan dikali 100%

Ini merupakan indikator baru pada tahun 2023 sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sehingga Pada Tahun 2023 indikator ini menetapkan target 80% dan capaian yang dihasilkan adalah 80% sehingga persentase capaian adalah sebesar 100%.

Indikator ini adalah indikator baru Biro PKUP di tahun 2023 sehingga belum bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Meskipun demikian di tahun mendatang hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk indikator kinerja ini adalah meningkatkan pengelolaan pemenuhan kebutuhan perkantoran.

**SASARAN 4** **Meningkatnya kualitas layanan internal Biro PKUP di lingkup Settama**

**Tabel III.8**  
**Capaian Kinerja Sasaran 4**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2022	Target	Realiasi	% *)	Target 2024	% capaian
7. Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro PKUP di lingkup Settama	nilai	3,18	3,5	3.11	88.86%	3.9	79.74%
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>88.86%</b>		<b>79.74%</b>

\*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

**7. Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro PKUP di lingkup Settama**

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan kualitas layanan internal Biro PKUP di lingkup Settama. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 88.86%.

Formula perhitungan

1. Menentukan bobot masing – masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan.
2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus skala likert.

3. Hitung rata – rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus  $(\sum(fn))/(\sum f)$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (x) dengan rumus :  $(X) = (an) \times (bn)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan.

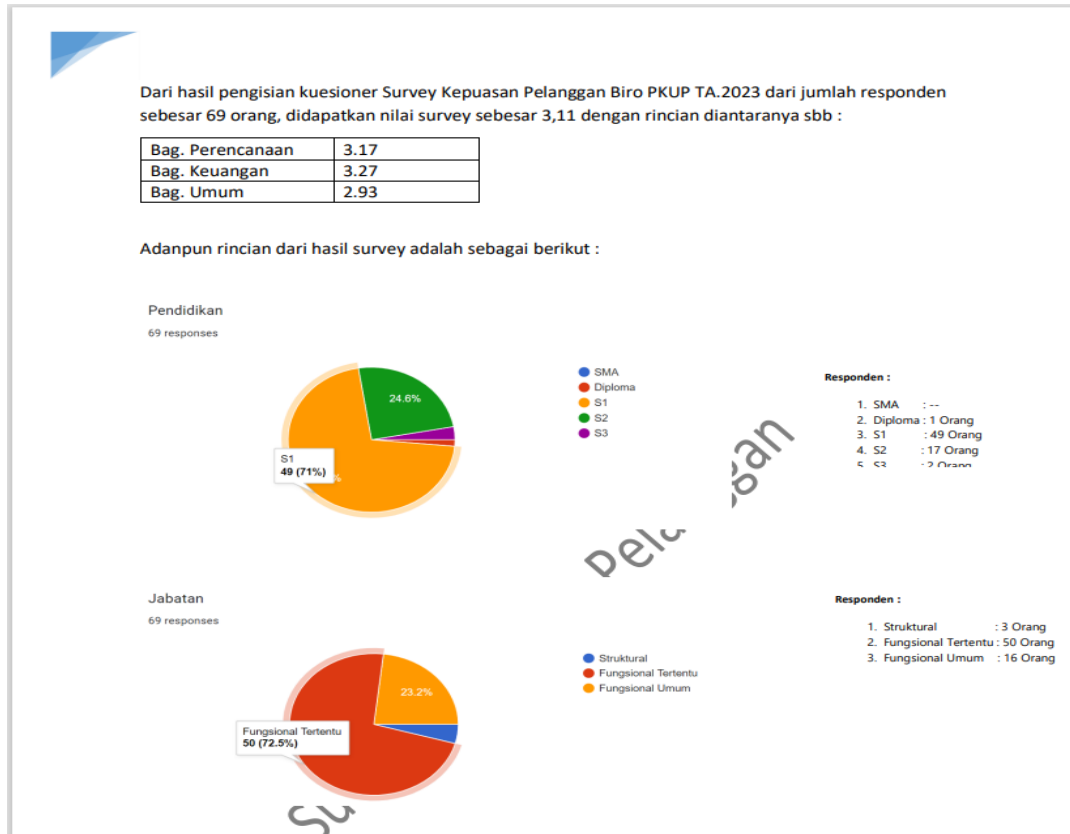
Dari hasil pengisian kuesioner Survey Kepuasan Pelanggan Biro PKUP TA.2023 dari jumlah responden sebanyak 69 orang, didapatkan nilai survey sebesar 3,11 dengan rincian di antaranya sebagai berikut:

- a. Pelayanan Perencanaan : 3,17 nilai
- b. Pelayanan Keuangan : 3,27 nilai
- c. Pelayanan Umum : 2,93 nilai

**Tabel III.9**  
**Indeks Kepuasan Layanan Biro PKUP 2019-2023**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Target 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	
7.Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro PKUP	Nilai	3.89	3.18	3.18	3.18	3.11	3,9

Dibandingkan dengan kepuasan layanan biro PKUP Tahun 2022 sebesar 3,18 pada tahun 2022 maka kinerja ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro PKU pada tahun 2023 belum tercapai dikarenakan mayoritas responden memberikan penilaian skala 3 (puas) sekitar 67.36% dan hanya 25% yang memberikan nilai sangat puas, hal ini mengindikasikan masih diperlukannya peningkatan kualitas layanan Biro PKUP yang memberikan nilai kepuasan lebih kepada pemangku kepetingan selaku penerima layanan Biro PKUP di BSN agar penilaian kepuasan pelanggan ke depannya dapat dioptimalkan sesuai target yang direncanakan.



**Gambar 3.5**  
**Jumlah Responden Survey Kepuasan Pelanggan Biro PKUP**

Dibandingkan tahun sebelumnya capaian kinerja untuk indikator ini mengalami penurunan yang signifikan terutama pada layanan umum oleh karena itu secara komprehensif beberapa masukan penerima layanan terhadap layanan Biro PKUP antara lain:

- Proses revisi anggaran sebaiknya lebih panjang
- Aplikasi e-performance sudah semakin baik, tidak lemot lagi, semoga terus ditingkatkan,
- Kecepatan layanan pertanggung jawaban administrasi keuangan
- Kompetensi petugas layanan keuangan dengan mengikuti diklat kompetensi
- Dokumen SPJ sebaiknya dapat diproses juga dalam bentuk elektronik melalui aplikasi Sipakar
- Layanan kebersihan dan kenyamanan ruang kerja dan toilet lingkungan kerja sehingga .
- Internet CWS Mampang masih kurang stabil.

Diharapkan tahun mendatang layanan Biro PKUP semakin baik dan prima sehingga para pengguna layanan Biro PKUP makin puas dengan layanan yang diterima.



**SASARAN  
5****Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Settama di lingkup Biro PKUP****Tabel III.10  
Capaian Kinerja Sasaran 5**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
8. Persentase pelaksanaan RB Settama di lingkup Biro PKUP	%	93%	99%	106.45%	93%	106.45%
9. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Settama di lingkup Biro PKUP	Nilai	72.5	80	110.34%	80	100%
<b>Rata-rata capaian</b>				<b>108.40%</b>		<b>103,2%</b>

\*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Indikator kinerja untuk mengukur terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Settama di lingkup Biro PKUP terdiri dari indikator kinerja 1) Persentase pelaksanaan RB Settama di lingkup Biro PKUP dan 2) Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Settama di lingkup Biro PKUP.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 108.40%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 5.

**8. Persentase pelaksanaan RB Settama di lingkup Biro PKUP**

Persentase pelaksanaan reformasi birokrasi adalah penilaian yang dilakukan secara kolaboratif pada tingkat terimplementasinya kebijakan (*immediate outcomes*) oleh para instansi pengampu kebijakan dan capaian sasaran strategis yang merupakan *outcomes* dari implementasi kebijakan (*intermediate outcomes*).

Perhitungan indikator ini adalah dengan jumlah butir rencana aksi RB Settama di lingkup biro PKUP yang terlaksana sampai dengan Triwulan IV dibagi dengan jumlah seluruh butir rencana aksi dikali 100%.

Pada tahun 2023 ini terdapat 6 butir rencana aksi Reformasi Birokrasi Settama di lingkup Biro PKUP antara lain:

1. Mereviu penjenjangan kinerja BSN menggunakan pendekatan Critical Success Factor (CSF)
2. Memastikan perumusan kinerja individu pegawai telah selaras dengan kinerja organisasi dan telah dituangkan dalam SKP
3. Penyempurnaan aplikasi e-performance BSN
4. Penyusunan pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja
5. Evaluasi SAKIP mandiri oleh unit kerja
6. Evaluasi SAKIP BSN oleh Tim Evaluator AKIP BSN
7. Evaluasi SAKIP oleh Kemenpan RB

Dari butir rencana aksi di atas seluruhnya telah mencapai target yang ditentukan yaitu 106.45% ini artinya persentase capaian kinerja untuk indikator Persentase pelaksanaan RB Settama di lingkup Biro PKUP telah melebihi target 100%

IKU ini adalah indikator kinerja baru sehingga belum bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

#### 9. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Settama di lingkup Biro PKUP

Nilai Evaluasi Akuntabilitas merepresentasikan besaran hasil penilaian tingkat akuntabilitas kinerja unit kerja yang dilakukan secara mandiri mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan komponen yang dinilai, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

Perhitungan nilai evaluasi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Settama di lingkup Biro PKUP diambil dari hasil reviu mandiri Inspektorat adalah sebagai berikut:

**Tabel III.11**  
**Komponen Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Settama di lingkup Biro PKUP Tahun 2023**

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,80
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,20
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,20
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,80
<b>Nilai akuntabilitas kinerja</b>			<b>80.00 (BB)</b>

Dari hasil penilaian di atas maka realisasi dari indikator Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Settama di lingkup Biro PKUP adalah 80.00

nilai dengan kategori **BB**. Maka capaian kinerja IKU ini adalah sebesar 110.34% dari target yang ditetapkan sebesar 72,5 nilai

<b>SASARAN 6</b>	<b>Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Biro PKUP</b>
----------------------	---

**Tabel III.12  
Capaian Kinerja Sasaran 6**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
10. Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Biro PKUP	nilai	95	102.42	107.81%	95	107.81%
<b>Rata-rata capaian</b>				<b>107.81%</b>		<b>107.81%</b>

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Biro PKUP terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Biro PKUP. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 107.81% dan telah melebihi target 100%.

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 6.

### **10. Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Biro PKUP**

Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu instrumen penganggaran berbasis Kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada Pemangku Kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola Kementerian/Lembaga, unit eselon I, dan/atau satuan kerja bersangkutan.

Fungsi peningkatan kualitas bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKAK/L dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan sebagai salah satu dasar untuk penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan, penyusunan reviu angka dasar, penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/atau penyesuaian

anggaran tahun berkenaan, dan pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi.

Penilaian kinerja anggaran ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Terdapat 4 variabel yang terdiri atas:

- a. Capaian output sebesar 43,5% (empat puluh tiga koma lima persen);
- b. Efisiensi sebesar 28,6% (dua puluh delapan koma enam persen);
- c. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2% (delapan belas koma dua persen); dan
- d. Penyerapan anggaran sebesar 9,7% (sembilan koma tujuh persen).

Indikator ini adalah indikator kinerja baru di Tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Walaupun realisasi kinerja untuk indikator kinerja ini telah melebihi target yang ditetapkan namun beberapa hal penting yang juga perlu diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya yaitu capaian realisasi volume Rincian Output dan juga efisiensi

### III.2 CAPAIAN KEGIATAN

Pencapaian kinerja Biro PKUP tidak lepas dari capaian Rincian Output (RO) di Unit Kerja. Adapun realisasi dari RO disampaikan sebagai berikut:

**Tabel III.13**  
**Capaian Rincian Output (RO) Biro PKUP TA. 2023**

Kode	Kegiatan/KRO/RO	2023		%
		Target	Realisasi	
3550	Peningkatan Pelayanan Perencanaan, Keuangan dan Umum			
EBA.956	Layanan BMN	1 layanan	1 layanan	100%
EBA.962	Layanan Umum	1 layanan	1 layanan	100%
EBA.994	Layanan Perkantoran	1 layanan	1 layanan	100%
EBD.952	Layanan Perencanaan & Penganggaran	1 layanan	1 layanan	100%
EBD.953	Layanan Pemantauan dan evaluasi	1 layanan	1 layanan	100%
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1 layanan	1 layanan	100%

Kode	Kegiatan/KRO/RO	2023		%
		Target	Realisasi	
EBD.974	Layanan Manajemen Kearsipan	1 layanan	1 layanan	100%

### III.3 CAPAIAN DI LUAR PERJANJIAN KINERJA

Selain capaian sesuai dengan yang tertera dalam Perjanjian Kinerja, Biro PKUP juga melakukan berbagai hal dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi, antara lain:

- a. Opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2022 BSN mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI

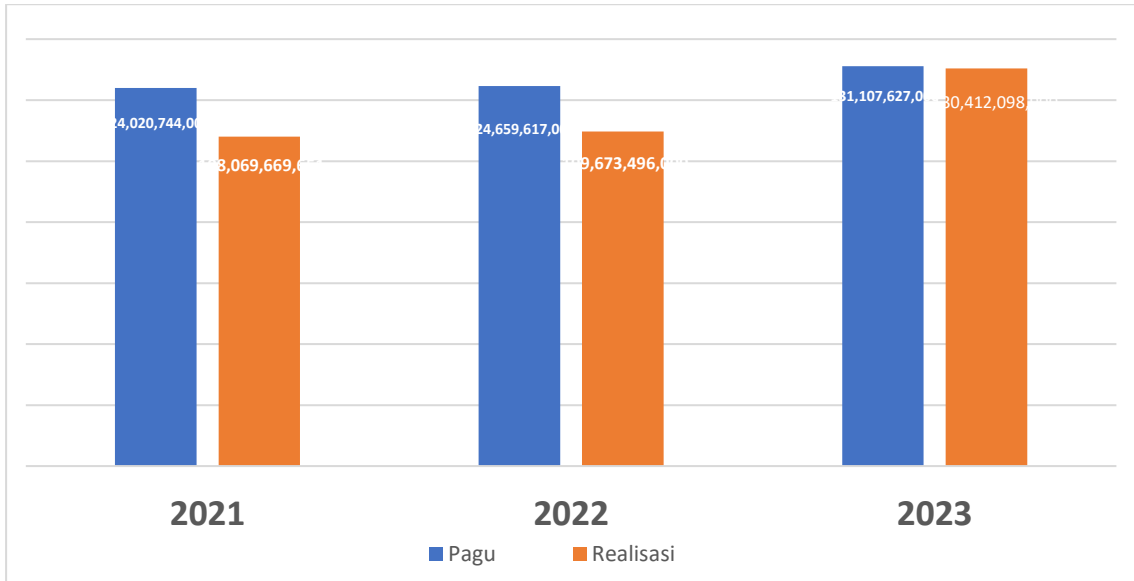


**Gambar III.6**  
**Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI**

### III.4 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA induk BSN Nomor SP DIPA-084.01-0/2023 tanggal 30 November 2022, pagu awal Biro PKUP TA. 2023 adalah sebesar Rp.132.214.537.000 dan pagu tersebut sepanjang tahun 2022 telah dilakukan revisi sehingga pagu akhir tahun 2023 menjadi Rp.131.107.627.000 dengan realisasi sebesar Rp 130.412.098.900 atau mencapai 99.47%.

Sandingan pagu dan realisasi anggaran Biro PKUP pada TA. 2021, 2022 dan 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



**Grafik 3.1**  
**Pagu vs Realisasi Anggaran Biro PKUP 2021-2023**

**Analisa Sumber Daya**

Dengan keterbatasan sumber daya, maka pada tahun 2023 Biro PKUP telah melakukan efisiensi sumber daya antara lain:

- a. Kolaborasi pelaksanaan kegiatan dengan Kementerian/Lembaga lain.
- b. Menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi dan beberapa pegawai yang merangkap jabatan dengan melakukan pekerjaan lain yang sudah ditugaskan.
- c. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dengan menggunakan aplikasi untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan.

---

## BAB IV PENUTUP

---

**L**aporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan (Biro PKUP) Tahun 2023 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Biro PKUP Tahun 2023 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Biro PKUP Tahun 2023, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu:

1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BSN.
2. Nilai Pengawasan Kearsipan BSN
3. Indeks pengelolaan aset
4. Indeks tata kelola pengadaan
5. Persentase permintaan kebutuhan perkantoran yang ditindaklanjuti
6. Persentase pelaksanaan RB Settama di lingkup Biro PKUP
7. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Settama di lingkup Biro PKUP, dan
8. Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Biro PKUP

Sementara itu beberapa capaian kinerja kegiatan biro PKUP Tahun 2023 yang belum mencapai target menjadi fokus pelaksanaan kegiatan di Tahun 2023 seperti:

1. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja BSN.
2. Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro PKUP.

Sehingga harapannya di Tahun 2024 capaian keseluruhan indikator kinerja Biro PKUP dapat seluruhnya mencapai target 100%.

## LAMPIRAN

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Perencanaan



#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ajat Sudrajat  
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Donny Purnomo J. E  
Jabatan : Plt. Sekretaris Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Donny Purnomo J. E

Jakarta, 24 Januari 2023

Pihak Pertama

Ajat Sudrajat



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, UMUM DAN PENGADAAN  
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	
			Volume	Satuan
1	Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN	1 Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja BSN	72,5	Nilai
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran	2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BSN	92	Nilai
3	Meningkatnya kualitas layanan umum dan pengadaan	3 Nilai Pengawasan Kearsipan BSN	81	Nilai
		4 Indeks pengelolaan aset	3,3	Nilai
		5 Indeks tata kelola pengadaan	61	Nilai
		6 Persentase permintaan kebutuhan perkantoran yang ditindaklanjuti	80	%
4	Meningkatnya kualitas layanan internal Biro PKUP di lingkup Settama	7 Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro PKUP di lingkup Settama	3,5	Nilai
5	Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Settama di lingkup Biro PKUP	8 Persentase pelaksanaan RB Settama di lingkup Biro PKUP	93	%
		9 Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Settama di lingkup Biro PKUP	72,5	Nilai
6	Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Biro PKUP	10 Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Biro PKUP	95	Nilai

**Kegiatan**

- 1 Peningkatan Pelayanan Perencanaan, Keuangan dan Umum (3550)

**Anggaran (Rp.)**

132.214.537.000

Pihak Kedua

Donny Purnomo J. E

Jakarta, 24 Januari 2023

Pihak Pertama

Ajat Sudrajat



**Biro Perencanaan, Keuangan,  
Umum dan Pengadaan  
Gd. Kemenko Maritim dan Investasi Lt.12  
Jl. MH. Thamrin No.8 Jakarta Pusat**